

**DETERMINAN PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUSUNAN
ANGGARAN (studi Pada Kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur)**



PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Starta I Pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Oleh :

Aan Gumiadi

B200110056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

DETERMINAN PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUNAN

ANGGARAN

(Studi Pada Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Timur)

PUBLIKASI ILMIAH

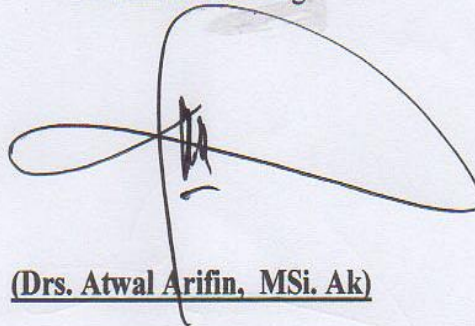
Oleh:

AAN GUMIADI

B 200 110 056

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal stroke with a small vertical mark in the center.

(Drs. Atwal Arifin, MSi. Ak)

HALAMAN PENGESAHAN

DETERMINAN PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUNAN ANGGARAN (Studi pada Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa timur)

oleh:

AAN GUMIADI

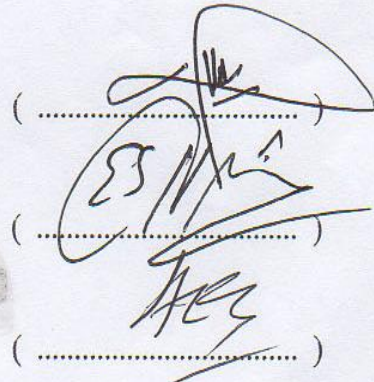
B 200110056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Sabtu, 30 April, 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

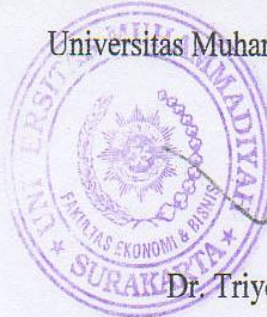
1. Drs. Atwal Arifin, M.Si, Ak.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Agus Endro S, M.Si.
(Anggota 2 Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Triyono, M.Si.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2016

Yang Menyatakan



AAN GUMIADI

B200110056

DETERMINAN PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUNAN ANGGARAN (Studi Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur)

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze : pengaruh Pendapatan (PAD) , the influence of the remaining budget (SiLPA) , Effect of General Allocation Fund (DAU) against Opportunistic Behavior Composer Budget Regency / City in East Java province . The data used in this research is secondary data obtained from www.djpk.depkeu.go.id .The population in this study are all regencies / cities in East Java province in 2011-2013 study period with the sampling technique used purposive sampling with criteria entire districts and cities that publish OPA years 2011- 2013 and report revenue budget data (PAD) , Budget financing surplus (SiLPA) and General Allocation Fund (DAU) in 2011- 2013. Based on current criteria the number of samples have 86 District / City . The analytical tool used in this research is multiple linear regression .

Based on the results of the analysis of this study show that the first hypothesis , local revenue (PAD) affects opportunistic behavior budgeting (OPA) . The results of the second hypothesis financing surplus budget (Silpa) effect on opportunistic behavior budgeting (OPA) . Results of the third hypothesis general allocation fund (DAU) has an effect on opportunistic behavior budgeting (OPA)

Keywords : Revenue(PAD) , Surplus Budget Financing (SiLPA) and General Allocation Fund (DAU)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.djpk.depkeu.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode penelitian tahun 2011-2013 dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria Seluruh Kabupaten dan kota yang mempublikasikan OPA tahun 2011- 2013 dan laporan APBD pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011- 2013. Berdasarkan kriteria yang ada jumlah sampel ada 86 Kabupaten/Kota. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA). Hasil dari hipotesis kedua sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA). Hasil dari hipotesis ketiga dana alokasi umum (DAU) mempunyai berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA).

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Dana alokasi Umum (DAU)

1. PENDAHULUAN

Era reformasi yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kekuatan baru dalam otonomi pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan diawali dari proses penyusunan anggaran yang ditengarai karena praktek perilaku oportunistik para pemangku kepentingan.

Dugaan adanya *miss allocation* dalam anggaran terjadi karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran (Keefer & Khemani, 2003). Alokasi sumberdaya dalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup, terutama terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran pemerintah, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politisi (Keefer dan Khemani, 2003).

Proses penyusunan APBD merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Proses pengalokasian dalam anggaran merupakan ruang bagi legislatif atau DPRD untuk memasukkan kepentingan konstituen yang diwakilinya. Disisi lain sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat eksekutif lebih dominan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih besar dalam menyusun APBD. Eksekutif juga memiliki kekuatan (*power*) yang lebih besar karena memiliki pemahaman terhadap birokrasi dan administrasi, seluruh aturan dan perundang-undangan yang melandasinya serta hubungan langsung dengan masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu lama mengakibatkan penguasaan informasi eksekutif lebih baik dari pada legislatif (Florensia, 2009). Selain lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan yang lebih baik dibanding pejabat legislatif. Hal inilah yang memberi peluang kepada penyusun anggaran baik legislatif maupun eksekutif untuk berperilaku oportunistik.

Perilaku oportunistik ini merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun (Maryono, 2013). Perilaku ini akan mengeksploitasi peluang keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya seluas mungkin. Terdapat dua komponen utama pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Dalam penentuan PAD legislatif akan mendorong eksekutif untuk selalu meningkatkan target sehingga dapat meningkatkan alokasi untuk program yang mendukung kepentingannya. Hal ini ditengarai sebagai perilaku oportunistik. Peluang perilaku oportunistik lain ditengarai juga terjadi pada sumber pendapatan daerah yang berbentuk dana

transfer pemerintah pusat, contohnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. DAU merupakan *block grant* yakni hibah yang pengunaannya cukup fleksibel atau tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Maryono, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil judul penelitian “Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran” (Studi pada Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur)

Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah pendapatan daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur.
2. Apakah jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur.
3. Apakah jumlah dana alokasi umum berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

Tujuan Penelitian

1. untuk menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur.
2. untuk menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur.
3. untuk menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh dana alokasi umum terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTENSI

Menurut Undang- Undang No. 32 tahun 2004 bab 1 ayat (14) Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Keefer & Khemani (2003) tentang *Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management* Menemukan bahwa legislatif lebih menyukai proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji kepada pemilihnya (*voters-nya*). Di sisi lain, lebih sulit bagi legislatif untuk memberikan janji yang dapat dipercaya berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, lebih sulit bagi para pemilih (*voters*) untuk mengukur dan mengetahui apakah legislator memang benar-benar memenuhi janjinya dalam hal penyediaan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Riky Maryono (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah” Terdapatnya pengaruh dana alokasi umum dengan perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah di Provinsi Sumatera Barat. Semakin besar dana

alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten/Kota maka akan semakin besar pula perilaku oportunistik legislatif dalam anggaran daerah.

Trisni Suryarini (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas *Aplikasi Agency Theory* di Sektor Publik menyatakan bahwa legislatif melakukan political corruption melalui realisasi discretion-ary power yang dimilikinya dalam penganggaran.

Fhatony (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas *Aplikasi Agency Theory* di Sektor Publik menyatakan bahwa legislatif melakukan political corruption melalui realisasi discretion-ary power yang dimilikinya dalam penganggaran.

Havid Sularso, et al (2014) dalam Penelitiannya menyatakan bahwa DAU memiliki proporsi yang paling besar dalam penerimaan daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana transfer untuk membiayai kegiatan pelayanan kepada masyarakat atau untuk kegiatan lain sesuai kepentingan politik legislatif maupun eksekutif. Keleluasaan menggunakan DAU memberikan peluang kepada para penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik.

Pengaruh PAD terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Perubahan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku *oportunistik legislative* (Abdullah dan Asmara, 2006; dalam Florensia, 2009). Secara konseptual perubahan APBD akan berpengaruh terhadap belanja, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal. Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Proporsi PAD yang rata-rata hanya 10% dari total penerimaan daerah memiliki kecenderungan bertambah saat perubahan anggaran. Hal ini membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Fathony, 2011). Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh SiLPA terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pembiayaan neto. SiLPA yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Hasil penelitian Florensia (2009) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik legislatif (OL). Namun demikian, penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) bertolak belakang dengan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal pada periode anggaran selanjutnya, yang berarti dapat berpengaruh pada

alokasi belanja tahun berikutnya sehingga hal ini memberi ruang bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan *free cash flow* tersebut untuk melakukan perilaku oportunistik.

SiLPA di sisi lain, mengurangi perilaku oportunistik legislatif. Alokasi sumber daya yang telah ditetapkan legislatif untuk pemenuhan kepentingannya ada yang tidak terserap. SiLPA juga bisa terjadi akibat asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Sebab, ternyata ada akumulasi dana yang masih belum bisa dijabarkan oleh eksekutif dan tidak diketahui legislatif. Akibatnya, dana yang dijabarkan dalam pengalokasian anggaran hanya sebagian dari dana yang sesungguhnya ada dan dimiliki daerah. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : SiLPA berpengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh DAU terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU memiliki proporsi yang paling besar pada penerimaan daerah, dimana seharusnya pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Keleluasaan tersebut berpotensi membuka ruang bagi perilaku oportunistik baik pada legislatif maupun eksekutif. Fathony (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dana alokasi umum dengan perilaku oportunistik. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2012) dan Maryono (2013) yang menyatakan bahwa dana perimbangan (Dana Alokasi Umum) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik legislatif. Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

3. METODE

Populasi, Sampel, Cara Memperoleh Data, Pengukuran Variabel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tercatat tahun 2011- 2013.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:115). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang melaporkan laporan keuangan PAD, SiLPA dan DAU periode 2011-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *metode purposive sampling*. Pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2010). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur yang tercatat tahun 2011- 2013.

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang melaporkan laporan keuangan PAD, SiLPA dan DAU periode 2011-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *metode purposive sampling*. Pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2010). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan secara rutin OPA tahun 2011- 2013.
2. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang melaporkan secara lengkap realisasi APBD tahun anggaran 2011–2013 dan mempublikasikan PAD, SiLPA, dan DAU.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini berupa data sekunder, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terdapat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

hasilnya dipengaruhi dan terikat oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2003:63). Variabel terikat (*Dependent Variable*) pada penelitian ini adalah Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA). Perilaku oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal sekalipun, dapat menyebabkan hubungan *prinsipal-agen* yang terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan *moral hazard* (penyalahgunaan wewenang).

Tahap pengukuran OPA dikembangkan dari penelitian Abdullah dan Asmara (2006) yaitu:

$$Spread (\Delta) = APBD_{tahun\ berjalan(t)} - APBD_{tahun\ sebelumnya(t-1)}$$

$$OPA = \Delta Pdk + \Delta kes + \Delta PU + \Delta perum + \Delta pen_ruang + \Delta pbgnan + \Delta perhub + \Delta linghidup + \Delta prtnhan + \Delta pendcapi + \Delta prmpnanak + \Delta KBklg + \Delta sos + \Delta ktngkrjn + \Delta kopUKM + \Delta penmodal + \Delta kbdyn + \Delta pmdOR + \Delta ksbgpol + \Delta otda + \Delta pembermasy + \Delta stat + \Delta arsip + \Delta komin + \Delta prpus + \Delta prtnian + \Delta khtanan + \Delta esdm + \Delta prwst + \Delta klautan + \Delta perdag + \Delta indus + \Delta trans.$$

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah,

retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain. (Florensia, 2009)

$PAD = spread\ PAD_{APBD\ tahun\ berjalan\ (t) - APBD\ tahun\ sebelumnya\ (t-1)}$

Sisa Lebih perhitungan Anggaran

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. (Florensia, 2009)

$SiLPA = spread\ SiLPA_{APBD\ tahun\ berjalan\ (t) -$

$APBD\ tahun\ sebelumnya\ (t-1)}$

Dana Alokasi Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2007).

$DAU = spread\ DAU_{APBD\ tahun\ berjalan\ (t) - APBD\ tahun\ sebelumnya\ (t-1)}$

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda. Metode regresi berganda yaitu metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda bertujuan untuk menguji pendapatan asli daerah, Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dana alokasi umum terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA). Data diolah dengan bantuan software SPSS 17. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi adalah:

Rumus $Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 SiLPA + \beta_3 DAU + + \epsilon$

Keterangan:

Y = Oportunistik Penyusunan Anggaran

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi dan estimator dari parameter

PAD = Pendapatan Asli Daerah

$SiLPA$ = Sisa lebih pembiayaan anggaran

DAU = Dana Alokasi Umum

ϵ = Variabel pengganggu

4. HASIL PENELITIAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Ssig
Konstanta	5.041	5.364	0.000
PAD	0.432	3.867	0.000
SILPA	-0.139	-2.506	0.014
DAU	0.177	2.967	0.036

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4.7 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$OPA = 5.041 + 0.432 PAD - 0.139 SiLPA + 0.177 DAU$$

Persamaan menunjukan bahwa perilaku oportunistik penyusunan anggaran dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan dana alokasi umum.

Uji F (Uji Simulatan)

Tabel 4.8

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik)

Mo del	R	R Square	Adjusted R Square
1	.414 ^a	.171	.141

Data skunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R^2 yang sudah diolah maka dapat dilihat nilai dari *adjusted* R^2 sebesar 0,141 atau 14,1%. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggran (OPA), sedangkan sisanya 85,9% dijelaskan oleh faktor faktor lain di luar model regresi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.414 ^a	.171	.141

Data skunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R^2 yang sudah diolah maka dapat dilihat nilai dari *adjusted* R^2 sebesar 0,141 atau 14,1%. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (OPA), sedangkan sisanya 85,9% dijelaskan oleh faktor faktor lain di luar model regresi.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 5.0
Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	p - value	Keterangan
PAD	3.867	1,988	0,000	Signifikan
SiLPA	- 2.506	1,988	0.014	Signifikan
DAU	2.967	1,988	0.036	Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa PAD memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 3.867 lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.988. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,014 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar -2.506 lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar -1,988. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel SiLPA berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua (H_2) diterima.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu

sebesar $0,036 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 2.967 lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,988. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel DAU berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Ketiga (H_3) diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh terhadap Oportunistik Penyusunan Anggaran (OPA) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikansi variabel PAD sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_1 diterima.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai pengaruh terhadap belanja Oportunistik Penyusunan Anggaran (OPA) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikansi variabel SILPA sebesar $0,014 < 0,05$ sehingga H_2 diterima.
- Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap Oportunistik Penyusunan anggaran. hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikansi variabel DAU sebesar $0,036 < 0,05$ sehingga H_3 diterima.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- Untuk penelitian selanjutnya supaya memperluas Obyek penelitian pada provinsi- provinsi yang lain.
- Untuk penelitian selanjutnya supaya memperluas Obyek penelitian pada provinsi- provinsi yang lain.
- Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penelitian yang berhubungan dengan perilaku oportunistik penyusunan anggaran (OPA)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006.
- Ardhini.2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada

Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah).JurnalSkripsi. Universitas Diponegoro.

Fathony, Adi Dicka, and Abdul Rohman. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Diss. Universitas Diponegoro, 2011.

Florensia, T. M. 2009. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada. (Tidak dipublikasikan)

Ghozali, H. Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.djpk.depkeu.go.id> data series di unduh pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 10.00 am.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.

Jogiyanto. 2010. Metodologi penelitian Bisnis. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Keefer, P. dan Stutu Khemani. 2003. The Political Economy of Public Expenditures. Background paper for WDR 2004.

Martinez-Vazquez, Jorge, F. Javier Arze & Jameson Boex. 2006. Corruption. Fiscal Policy, and Fiscal Management. Working paper. Publication was produced for review by The United states Agency for International Development.

Maryono, Riky. 2013. Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. JurnalSkripsi. Universitas Negeri Padang

Mauro, Paolo. 1998. Corruption and The Composition of Government Expenditure. Jurnal of Public Economics 69:263-279.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24/2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37/2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37/2006 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21/2007 tentang perubahanke tiga atas Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Trisni Suryarini (2012) Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publi.